



► KEUANGAN NEGARA

# APBN Difokuskan untuk MBG dan Kopdes

Akbar Evandio

dan Surya Dua Artha Simanjuntak  
redaksi@jibinews.co

JAKARTA—Anggaran pemerintah tahun ini diprioritaskan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan koperasi desa.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan fokus untuk membiayai program unggulan pemerintah seperti MBG dan koperasi desa. Tommy, sapaan Thomas Djiwandono, menjelaskan pemerintah ingin meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto pun sempat menginstruksikan proses realokasi anggaran untuk belanja produktif.

► Halaman 10

## APBN Difokuskan...

Oleh sebab itu, belanja pemerintah ke depan akan fokus ke program unggulan yang diyakini memberikan efek pengganda besar seperti program MBG dan koperasi desa. "Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antarprovinsi," ujar Tommy dalam acara *HSBC Summit 2025*, Selasa (22/4).

Selain dua program unggulan itu, sambungnya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk program yang diyakini memberikan dampak nyata ke masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, hingga renovasi sekolah.

Lebih lanjut, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat. Oleh sebab itu, pemerintah masih berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3%.

Ia menyatakan ambang batas defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang. Oleh sebab itu, Tommy mengaku APBN 2025 dirancang dalam upaya peningkatan pendapatan, efisiensi, dan produktivitas belanja.

Caranya, dengan pelaksanaan reformasi perpajakan, perluasan

basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga ingin meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, melakukan inovasi pelayanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. "Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk membantu mempercepat transformasi ekonomi," ungkap Tommy.

## Pengeluaran APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah mengungkapkan akan menambah anggaran program MBG pada tahun ini dari yang awalnya Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Sementara itu, Prabowo menargetkan pembangunan 80.000 koperasi desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber dana pembangunan puluhan ribu koperasi desa itu berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT). "Belanja tidak terduga ini digunakan untuk mengejar yang sekarang, karena kami rencanakan 80.000 desa lebih ini akan di-*launching* di bulan Juli," kata Tito.

Tito menjelaskan, anggaran BTT untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan bagi daerah-daerah yang belum memasukan program tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan. Sejalan dengan hal itu, Kemendagri

telah menyiapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum bagi para kepala daerah agar dapat menggunakan BTT untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih paling lambat Juli 2025.

Adapun, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengklaim dirinya telah menghitung secara kasar terkait dengan keuntungan yang bisa dikantongi 80.000 Kopdes Merah Putih. Menurut perhitungannya, setiap Kopdes Merah Putih bisa meraup untung sekitar Rp1 miliar per tahun. "Jadi setahun bisa Rp80 triliun seluruh kopdes. Bisnisnya monopoli dan *captive market*, masa enggak untung?" kata Budi Arie, Senin (21/4).

Bahkan, Budi optimistis keberadaan 80.000 Kopdes ini akan menjadi investasi sosial di desa. "Kita harus optimistis bahwa ini bukan uang hilang tetapi ini investasi sosial di desa," ujarnya.

Di samping itu, dia menyebut, Kopdes Merah Putih juga dapat membuka lapangan kerja baru hingga 2 juta orang.

Dalam hal pengawasan, Budi Arie mengklaim dirinya telah mewanti-wanti kepada para kepala desa agar sistem dari 80.000 Kopdes perlu dijaga dan diperketat. Bahkan, dia juga menekankan jika di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan alias *fraud*, akan langsung ditindak tegas dalam rapat anggota tahunan. "Positifnya koperasi desa ini adalah rapat anggota tahunan, jadi setiap tahun dievaluasi, begitu enggak beres, ya, diganti ketuanya." (*Bisnis.com*)